

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Administrasi Desa di Kecamatan Namorambe

Piki Darma Kristian Pardede¹, Apriliani Lase², Doli Tua Mulia R Panjaitan³, Prietsaweny Riris T Simamora⁴
 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenenu, Indonesia¹
 Program Studi Pariwisata, Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia²
 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia³
 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia⁴
 Email: pikipardede@unimor.ac.id

Received 19 November 2025; Revised 2 February 2026 ; Accepted for Publication 2 February 2026; Published 30 May 2026

Abstract — This community service initiative aimed to facilitate training in the field of village administration, with the objective of enhancing village development planning and strengthening digital-based village administrative governance. Through this program, it was expected to foster accountable and transparent governance at the village level and to develop village officials with comprehensive knowledge, positive attitudes, and proficient skills conducive to advancing village development. The community service activities were conducted from 26-28 August 2024 and involved 4 lecturers, 6 officials from the Namo Tualang Village Government, and 15 members representing both the local community and the Village Consultative Body (BPD). Meanwhile, activities in Gunung Kelawas Village involved the village head, 4 village officials, 4 of BPD, and 7 community representatives. The methodologies employed in this initiative were Participatory Rural Appraisal (PRA) and Participatory Learning and Action (PLA). The activities focused on lectures, discussions, and interactive brainstorming sessions among participant groups, followed by concrete actions or practical activities related to community empowerment materials. The result of the community service activities were consistent with the predetermined plan, as village governments and community representatives demonstrated positive responses and high levels of enthusiasm for the training, resulting in significant improvements in participants' knowledge, attitudes, and skills.

Keywords — capacity development, public governance, village administration, village development

Abstrak— Inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan di ranah administrasi desa, dengan tujuan meningkatkan perencanaan pembangunan desa, dan tata kelola administrasi digital desa. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan menumbuhkan tata kelola yang akuntabel dan transparan di tingkat desa dan menumbuhkan aparatur pemerintahan yang mempunyai wawasan komprehensif, sikap positif, dan keterampilan yang mahir untuk memajukan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 26–28 Agustus 2024 melibatkan 4 Dosen Perguruan Tinggi, Aparatur Pemerintahan Desa Namo Tualang sebanyak 6 orang serta 15 warga yang terdiri dari unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu, kegiatan di Desa Gunung Kelawas melibatkan Kepala Desa, 4 aparatur desa, 4 anggota BPD, dan 7 perwakilan masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam inisiatif ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Learning and Action* (PLA). Upaya ini dijalankan dengan berfokus pada sosialisasi, musyawarah, dan sesi brainstorming interaktif di antara peserta kelompok, diikuti dengan tindakan atau kegiatan nyata yang berkaitan dengan materi pemberdayaan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan, karena pemerintah desa dan perwakilan

masyarakat menunjukkan respons positif serta antusiasme yang tinggi terhadap pelatihan, sehingga menghasilkan transformasi yang signifikan dalam wawasan, sikap, dan keterampilan.

Kata Kunci— pengembangan kapasitas, tata kelola pemerintahan, administrasi desa, pembangunan desa

I. PENDAHULUAN

Permasalahan lemahnya kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan serta masyarakatnya tidak dapat dilepaskan dari posisi subordinatif desa terhadap institusi supra-desa, baik kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Hal ini berakar pada kebijakan desentralisasi yang digagas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelimpahan kewenangan ke daerah, pada praktiknya desentralisasi berhenti pada level kabupaten/kota dan tidak menjangkau desa secara signifikan [1]. Desa masih di kontruksikan sebagai entitas administratif sekaligus objek kebijakan pembangunan dari institusi supra-desa, bukan sebagai subjek yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola sumber daya lokalnya (*local self-government*). Bahkan, kewenangan asli yang melekat pada eksistensi desa sebagai komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri (*self-governing community*) belum sepenuhnya diakui [2].

Konsekuensi dari kondisi ini adalah terjebaknya desa dalam struktur ketergantungan yang kuat terhadap pemerintah supra-desa, baik dalam aspek regulasi, pendanaan, maupun arah kebijakan pembangunan. Situasi demikian tidak hanya membatasi ruang gerak desa untuk mengembangkan potensi dan kemandiriannya, tetapi juga semakin menjauhkan desa dari cita-cita mewujudkan otonomi sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, tanpa penguatan kewenangan yang memadai, desa akan terus berada pada posisi marginal dalam sistem pemerintahan, sehingga sulit memainkan peran strategis sebagai pilar pembangunan berbasis masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk meninjau kembali paradigma desentralisasi agar mampu memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi desa dalam mengelola kepentingan dan sumber daya lokalnya.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang ditujukan untuk mendorong desa menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis tidak dapat dilepaskan dari kapasitas serta kinerja pemerintahan desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan Pembangunan [3]. Dalam konteks ini, kapasitas dan kinerja desa merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan upaya menuju kemandirian desa. Kapasitas pemerintah desa merujuk pada kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada institusi desa. Tingkat kapasitas ini menjadi indikator utama yang mencerminkan kualitas kinerja pemerintahan desa. Dengan demikian, kinerja yang optimal hanya dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem yang memadai terutama dalam menyusun perencanaan Pembangunan desa. Namun demikian, persepsi umum yang berkembang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa masih relatif terbatas. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketergantungan desa terhadap intervensi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi [4].

Kegiatan pengabdian ini berlandaskan pada teori *capacity building* yang dipahami sebagai suatu proses dinamis untuk melakukan serangkaian transformasi multi-level pada individu, kelompok, organisasi, dan sistem. Tujuan utama dari proses ini adalah memperkuat kemampuan adaptasi individu maupun organisasi sehingga mampu merespons perubahan lingkungan secara efektif. Grindle [5] menjelaskan bahwa dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, *capacity building* terfokus pada tiga dimensi utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia (*development of human resources*), penguatan organisasi (*strengthening organization*), dan reformasi institusi (*reformation of institutions*). Pandangan ini sejalan dengan Rizal [6] yang menekankan bahwa pengembangan kapasitas memiliki dimensi sekaligus tingkatan, meliputi tingkat individu, organisasi, dan sistem. Lebih lanjut, pentingnya strategi *capacity building* dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia, khususnya aparaturnya, agar mampu berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas kolektif organisasi [7]. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, pengembangan kapasitas tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan keterampilan teknis individu, tetapi juga sebagai strategi menyeluruh untuk memperkuat daya saing organisasi dan efektivitas sistem pemerintahan.

Kapasitas pemerintah desa merujuk pada kemampuan dalam menguasai pengetahuan, informasi, serta keterampilan dalam mengaplikasikan instrumen kebijakan dan program untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Kapasitas ini juga mencakup inisiatif untuk melakukan inovasi atau pembaruan dalam pengelolaan pembangunan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat, sehingga mendorong desa menjadi lebih dinamis dan mampu mewujudkan visi serta misi yang telah ditetapkan [7].

Dalam konteks kebijakan nasional mengenai pengembangan dan peningkatan kapasitas pemerintahan pada era desentralisasi, Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas mengidentifikasi tiga tingkatan utama. Tingkatan pertama adalah level sistem, yang mencakup regulasi dan kebijakan sebagai instrumen yang dapat mendukung maupun membatasi pencapaian tujuan tertentu. Tingkatan kedua adalah level kelembagaan atau entitas, yang terkait dengan struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, prosedur kerja, instrumen manajemen, serta pola hubungan dan jejaring antarorganisasi. Tingkatan ketiga adalah level

individu, yang menekankan pada kualitas sumber daya manusia, meliputi keterampilan, kualifikasi, pengetahuan, wawasan, sikap, etika, dan motivasi yang berperan dalam organisasi [8], [9].

Sejalan dengan hal tersebut, aparaturnya desa membutuhkan tiga jenis kemampuan untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintahan desa. Pertama, kemampuan dasar, yang mencakup pemahaman terhadap regulasi desa, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengetahuan mengenai tugas dan fungsi aparaturnya desa. Kedua, kemampuan manajerial, yang berkaitan dengan keterampilan dalam manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, aset desa, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, kapasitas teknis, yang meliputi penguasaan administrasi desa, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, perumusan perdes, serta pelaksanaan pelayanan publik secara efektif [8].

Dengan demikian, peningkatan kapasitas pemerintah desa harus dipahami secara komprehensif pada tiga level berbeda, sekaligus memastikan perangkat desa memiliki kecakapan dasar, manajerial, dan teknis agar mampu mewujudkan tata kelola desa yang baik [10],[11],[12],[13],[14].

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga, menyediakan layanan publik yang optimal, dan memperkuat daya saing wilayah merupakan aspek fundamental yang perlu menjadi perhatian [15]. Untuk mencapai sasaran tersebut, kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan administrasi bagi aparaturnya desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan teknis dan manajerial mereka. Aparaturnya desa bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek administrasi yang mencakup struktur organisasi, pencatatan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan dokumen pembangunan sebagai bagian penting dari pelayanan publik. Administrasi yang teratur dan terdokumentasi dengan baik akan menghasilkan data yang akurat dan relevan dapat digunakan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja aparaturnya pemerintah desa [16].

Melihat berbagai kendala yang masih dihadapi desa, terutama pada aspek penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan administrasi, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparaturnya agar administrasi dapat berfungsi sebagai sumber data yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat melalui pelatihan perencanaan pembangunan desa dan tata kelola administrasi desa yang melibatkan aparaturnya dan masyarakat Desa Namo Tualang serta Gunung Kelawas menjadi solusi yang relevan. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat keterampilan, meningkatkan pengetahuan, serta mendorong terciptanya tertib administrasi yang menunjang pelayanan publik desa [17].

II. METODE PENGABDIAN

Kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa dalam pelatihan perencanaan pembangunan desa untuk penyusunan RPJMDes serta pengelolaan administrasi desa di

Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas dilaksanakan dengan pendekatan kombinasi *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Learning and Action* (PLA). Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan menekankan keterlibatan aktif aparatur desa dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan [18]. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menggali potensi lokal sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Melalui pendekatan ini, peserta pelatihan terlibat secara langsung pada setiap tahap kegiatan [19]. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelatihan perencanaan pembangunan desa, sehingga perlu pengaturan waktu pelaksanaan yang tepat. Di samping itu, komunikasi yang efektif antar peserta dan fasilitator menjadi komponen penting dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan dan pembuatan sistem administrasi digital [20].

Kegiatan ini memberikan dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana tata kelola administrasi desa dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparatur desa di Kecamatan Namorambe. Selain itu, penguatan kemampuan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengadministrasian desa menjadi hal yang sangat diperlukan, agar aparatur desa mampu berinovasi dan mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terkait penyusunan RPJMDes dan administrasi desa membutuhkan fasilitas pelatihan yang memadai, serta kerja sama yang sinergis antara tim fasilitator dan pihak desa sebagai mitra pengabdian dalam upaya mewujudkan keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan dalam pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada 26–28 Agustus 2024 dengan menetapkan subjek pengabdian dari unsur Aparatur Pemerintahan Desa Namo Tualang sebanyak 6 orang serta 15 warga yang terdiri dari unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu, kegiatan di Desa Gunung Kelawas dihadiri oleh Kepala Desa, 4 aparatur desa, 4 anggota BPD, dan 7 perwakilan masyarakat. Selama tiga hari, peserta kegiatan memperoleh materi dasar dan praktik langsung dari dosen fasilitator terkait penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa, termasuk proses penyusunan RPJMDes dan pengelolaan keuangan desa.

Pada aktivitas pengabdian ini dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap assessment, tahap sosialisasi dan tahap bimbingan dan pendampingan. Pada tahap asesment, tim pengabdian dari unsur dosen sekaligus menjadi fasilitator kegiatan melakukan survei awal dan analisis kondisi sosial untuk mengidentifikasi serta memperkuat potensi dan permasalahan mitra di lokasi pelaksanaan program. Survei dan analisis situasi ini melibatkan pemerintah desa dan warga setempat guna memetakan berbagai aspek strategis, meliputi kelembagaan desa, manajemen pelayanan aparatur, keterbukaan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, kondisi infrastruktur (fasilitas umum dan sosial), serta kebijakan pemerintahan

desa. Pengumpulan data dilakukan pada area yang ditetapkan dengan melibatkan sejumlah responden melalui wawancara, kemudian hasilnya diolah ke dalam matriks temuan survei dan wawancara seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

Program peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan penyusunan RPJMDes dan tata kelola administrasi desa di Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas diarahkan untuk memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta memperbaiki perencanaan pembangunan desa. Sasaran utamanya meliputi:

1. Peningkatan kinerja pemerintah dan aparatur desa melalui pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan.
2. Penguatan sistem pendampingan serta program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.
3. Peningkatan sistem informasi dan pengelolaan data desa berbasis teknologi guna memperbaiki koordinasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kinerja desa, sekaligus mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Program peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RPJMDes pada pemerintahan desa dilaksanakan melalui kombinasi *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Learning and Action* (PLA). Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi [18]. Pendekatan ini ditempatkan sebagai bagian integral dari proses peningkatan kapasitas aparatur, didukung dengan pengaturan alokasi waktu yang efektif dan pola komunikasi yang konsisten. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat sarana dan prasarana pengelolaan administrasi dan pembelajaran politik desa secara berkelanjutan.

Tabel 1. Hasil Survey dan Asesmen

No	Dimensi	Hasil Survey dan wawancara
1	Kelembagaan Desa	Desain kelembagaan desa masih menerapkan pola kerja yang bersifat tradisional
2	Manajemen pelayanan aparatur desa	Pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya memberikan rasa puas, terutama dalam aspek kemudahan dan kecepatan pelayanan.
3	Keterbukaan penggunaan dan pelaporan	Pada beberapa forum musdes sudah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dan laporan keuangan desa, namun pelaksanaannya belum transparan dan belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
4	Pembangunan desa	Musrenbang desa telah dilaksanakan, tetapi prosesnya belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat desa.

5	Kesehatan	Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat tergolong tinggi, walaupun masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya.
6	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan, namun belum secara optimal menjangkau kebutuhan layanan dasar masyarakat.
7	Kebijakan	Pengambilan keputusan masih cenderung terpusat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih dominan menggunakan pendekatan top-down.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pemerintahan Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas

Tahap kedua adalah kegiatan sosialisasi program, yang diselenggarakan pada 27 Mei 2024 dan dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat di Kantor Kepala Desa Gunung Kelawas dan Desa Namo Tualang seperti yang ditampilkan pada gambar 1. Sebelum pelaksanaan sosialisasi pelatihan perencanaan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, pendamping dituntut memiliki pemahaman komprehensif terhadap sejumlah aspek penting. Aspek tersebut meliputi kondisi sosial masyarakat, peran dan fungsi pendamping, siklus program pembangunan desa, urgensi data dalam proses perencanaan, metode partisipatif, serta strategi untuk memotivasi pemerintah desa dalam mengembangkan kapasitasnya.

Partisipasi masyarakat yang nampak pada gambar 1, menunjukkan antusiasme tinggi, disertai dorongan agar program pelatihan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan bahwa program pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintahan desa, sekaligus memotivasi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan di Kantor Desa Namo Tualang, Kecamatan Namorambe, menunjukkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.



Tahap terakhir adalah bimbingan dan pendampingan, yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2024. Kegiatan ini berfokus pada penguatan wawasan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam menyusun administrasi tata kelola pemerintahan desa. Sebagaimana diidentifikasi sebelumnya, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang telah dilaksanakan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi keluaran berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki pedoman baku dalam mengimplementasikan program pembangunan, khususnya di Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Hambatan internal dipengaruhi oleh pelaksanaan bimbingan teknis yang masih bersifat satu arah, adanya keterbatasan pemahaman peserta terhadap maksud dan tujuan program; serta absennya evaluasi pasca-Musrenbangdes terkait kemampuan aparatur desa dalam memahami dokumen RPJMDes dan keterkaitannya dengan implementasi program. Di sisi lain, faktor eksternal berkaitan dengan lemahnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi dan lembaga mitra lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pembinaan aparatur desa, dukungan perguruan tinggi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan menjadi esensial. Keterbatasan fasilitas bimbingan dan pelatihan penyusunan RPJMDes jangka panjang dikhawatirkan akan mengurangi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas, serta menghambat peningkatan kesadaran sosial-politik aparatur desa. Oleh karena itu, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sangat diperlukan agar proses bimbingan dan pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penyediaan akomodasi pelatihan penyusunan RPJMDes menjadi kebutuhan mendasak, yang memerlukan sinergi berkelanjutan antara fasilitator dan mitra sasaran dalam rangka memperkuat program pengabdian kepada masyarakat.

B. Hasil Pendampingan pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa dan penyusunan RPJMDes;

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilandaskan pada kerangka capacity building atau pengembangan kapasitas, yang dipahami sebagai proses terstruktur untuk mendorong perubahan bertahap pada level individu, kelompok, organisasi, hingga sistem sosial secara lebih luas. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemampuan adaptif agar individu dan organisasi dapat merespons dinamika dan tantangan lingkungan secara efektif. Dalam konteks pemerintahan desa, penguatan kapasitas aparatur menjadi penting karena terkait langsung dengan kualitas pelaksanaan fungsi administratif dan penyediaan layanan publik. Pengembangan kapasitas ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, penguatan kemampuan dasar, yaitu pemahaman mengenai regulasi desa, prinsip tata kelola, serta tugas dan fungsi kelembagaan. Kedua, peningkatan kemampuan manajerial yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan publik, aset, dan keuangan desa. Ketiga, kemampuan teknis, termasuk penyusunan administrasi, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pembuatan peraturan desa (perdes), serta implementasi pelayanan publik.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan di Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas berfokus pada pelatihan penyusunan dokumen dan pengarsipan administrasi pemerintahan desa, seperti buku peraturan desa, keputusan kepala desa, inventarisasi aset, serta dokumen perencanaan dan musyawarah desa. Melalui penguatan ketiga aspek tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan responsif.

Pelatihan tata kelola administrasi desa ini disertai dengan evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui indikator perubahan perilaku yang mencakup peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam pengelolaan administrasi dan perencanaan pembangunan desa seperti yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Indikator Perubahan Perilaku dan Persentase Pemahaman Materi Perencanaan Pembangunan Desa

Tujuan	Indikator	Persentase Pemahaman
Pengetahuan	Perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses penyusunan buku peraturan desa, buku arsip pemerintahan desa, profil desa, serta peta potensi desa.	75%
	Perangkat desa mampu menyelaraskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data Desa (data sekunder) • Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa 	75%

	Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mampu memahami dokumen keputusan kepala desa dan buku agenda dalam bentuk peraturan desa (Perdes)	75%
	Aparatur desa memiliki pemahaman mengenai berbagai jenis-jenis inventaris desa, dokumen administrasi desa, buku tanah kas desa, serta keuangan atau aset desa.	70%
	Perangkat desa memiliki kemampuan untuk memahami buku lembaran desa serta berita acara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyusun laporan hasil pengkajian kondisi dan potensi desa secara komprehensif. • Dapat merumuskan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa. • Mampu menyusun rencana prioritas kegiatan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. 	75%
Sikap	Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menunjukkan sikap menerima, memperhatikan, serta menilai dan mengorganisasi pemahaman mereka terhadap pentingnya dokumen RPJMDes sebagai komponen utama dalam perencanaan pembangunan desa.	65%
Keterampilan	Aparatur pemerintahan desa terampil dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.	60%
Rata-rata		70%

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur di Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas mencapai 70%, yang termasuk dalam kategori cukup. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kesadaran dan motivasi aparatur desa untuk mengikuti kegiatan pelatihan, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku perangkat desa setelah pelaksanaan pelatihan berada pada kategori yang relatif baik.

Berdasarkan hasil pelatihan dan pendampingan terdapat sisa sebesar 30% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Menurut pengamatan, peserta pelatihan terkhusus pemerintah

desa memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi intra warga sehingga menghambat komunikasi dalam pengembangan sosialisasi dalam penjabaran program-program Pembangunan desa bagi warga.

Kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [21]. Dalam kerangka tersebut, terdapat empat pendekatan utama yang menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan, antara lain:

1. Pendekatan politik berorientasi pada proses penerjemahan visi dan misi kepala desa ke dalam kebijakan, program, serta kegiatan yang konkret dan terukur. Pendekatan ini menekankan pentingnya legitimasi politik dalam memastikan bahwa arah pembangunan sejalan dengan mandat dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh pemimpin desa.
2. Pendekatan teknokratik menekankan pentingnya penerapan metode ilmiah, analisis berbasis data, serta rasionalitas kebijakan dalam proses perencanaan. Pendekatan ini biasanya melibatkan lembaga profesional seperti birokrasi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan pembangunan.
3. Pendekatan partisipatif menjadi elemen krusial karena menempatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai aktor utama dalam perumusan perencanaan pembangunan melalui proses musyawarah dan deliberasi publik. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memastikan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pendekatan top-down dan bottom-up menuntut adanya sinergi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan aspirasi masyarakat desa. Artinya, perencanaan desa tidak hanya bersifat reaktif terhadap arahan dari atas, tetapi juga proaktif dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Pemahaman terhadap tahapan dan pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan menjadi aspek fundamental yang harus dikuasai oleh aparatur Pemerintahan Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas. Pengetahuan ini berfungsi sebagai pedoman konseptual dan praktis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa agar kualitas perencanaan yang dihasilkan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan pengakuan kepala desa, proses perumusan rencana pembangunan desa selama ini masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama terletak pada rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar aparatur desa, di mana banyak di antara mereka belum menempuh pendidikan tinggi. Bahkan bagi yang telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, sebagian besar tidak berasal dari disiplin ilmu yang relevan dengan bidang pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan analitis dan teknis aparatur dalam memahami konsep, tahapan, serta pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Akibatnya, perencanaan yang dihasilkan sering kali belum mampu menggambarkan kebutuhan riil masyarakat maupun strategi pembangunan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Hal ini berimplikasi pada lemahnya sinkronisasi antara program pembangunan yang dijalankan selama lima tahun terakhir dengan visi kepala desa. Program pembangunan yang ada masih bersifat rutin dan terbatas pada sektor infrastruktur dasar, tanpa inovasi strategis yang mampu mendorong transformasi ekonomi desa.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat tersebut berkontribusi pada peningkatan kemampuan aparatur desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah. Pada tahap akhir kegiatan, para perangkat desa menyusun rancangan prioritas pembangunan melalui forum diskusi kelompok. Proses ini menghasilkan sejumlah usulan program strategis, antara lain pengembangan sektor kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan administrasi desa, serta pengembangan sistem pertanian terpadu sebagai upaya mendukung kemandirian dan keberlanjutan desa. Pada Gambar 2 menampakkan keseriusan peserta dalam menerima penjelasan dari fasilitator. Bagi kedua desa forum pelatihan ini sangat membantu memberikan edukasi dalam pengembangan desa.



Gambar 2. Fasilitator Memberikan Materi Pelatihan dan Pendampingan pada Aparatur Pemerintahan Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas.

Sebagai hasil penguatan materi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan perencanaan pembangunan dalam menyusun RPJMDes dan tata kelola administrasi desa pada pemerintahan desa yang disampaikan oleh fasilitator tim pengabdian seperti yang terlihat pada Gambar 2, mahasiswa nantinya akan berkolaborasi membuat sistem pengadministrasian digital. Oleh karena itu, kerjasama perguruan tinggi sangat membantu dalam memberikan pelatihan perencanaan pembangunan dan tata kelola administrasi desa berbasis digital kepada aparatur desa dan masyarakat di kedua desa menjadi sehingga dapat mendorong

ketertiban administrasi dan target skala prioritas program pembangunan desa.

Kemitraan ini juga dapat diperluas dengan melibatkan unsur kelembagaan lain, seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan desa seperti TP-PKK, BUMDes, lembaga adat, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam pendampingan desa. Infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berupa platform pembelajaran dan praktik penyusunan administrasi digital desa.

Melalui pengembangan sistem administrasi berbasis digital, diharapkan terbangun pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kerapihan data, kesinambungan penyimpanan dokumen, dan keterpaduan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa [22][23]. Selain itu, penyediaan sistem ini diharapkan paling tidak menumbuhkan visi bersama dan membentuk komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Kabupaten Deli Serdang, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Adapun target luaran dari program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RPJMDes dan tata kelola administrasi desa pada pemerintahan desa di desa namo tualang dan desa gunung kelawas sebagai berikut:

1. Tim pengabdian memberikan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dan perangkatnya yang berfokus pada materi perencanaan Pembangunan dalam menyusun RPJMDes dan tata kelola administrasi desa dan perencanaan yang strategis; komunikasi publik; pendidikan anggaran desa dalam pencegahan praktik korupsi; teknik dan metode indentifikasi potensi desa dan materi lain yang relevan.
2. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif dengan Pemetaan pembagian peran terhadap stakeholder program pelatihan RPJMDes dan Tata kelola administrasi desa, dengan pandangan bahwa masing-masing elemen dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan partisipasi perangkat desa dan masyarakat pada setiap agenda Pembangunan desa. Pelatihan tata kelola administrasi desa berbasis digital secara menyeluruh akan meningkatkan kesadaran akan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas.
3. Menghasilkan output bimbingan penyusunan RPJMDes dan sosialisasi perencanaan Pembangunan yang efektif kepada masyarakat, akan mewujudkan partisipasi berkelanjutan dan meningkatkan partisipatif masyarakat pada agenda-agenda pembangunan desa Kabupaten Deli Serdang khususnya di desa Namo Tualang dan desa Gunung Kelawas.
4. Kedepannya Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas dapat menjadi desa percontohan untuk wilayah-wilayah Desa di kabupaten Deliserdang yang memiliki persoalan yang sama terhadap rendahnya pemahaman

pemerintahan desa dalam menyusun RPJMDes dan tata kelola administrasi desa.

Uraian dari hasil pengabdian masih ditemukan kelemahan dalam sumberdaya aparatur yang memahami pengoperasian system administrasi digital. Namun antusias aparatur pemerintahan desa cukup memiliki minat yang baik dalam memenuhi layanan berbasis digital di kedua desa. Hal ini ditemukan bahwa minat ini berpengaruh pada kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam memberikan layanan public kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil pengabdian tim pengusul sebelumnya menawarkan untuk menjadikan instrument pengadaan layanan digital dalam dokumen RPJMDes untuk di terapkan pada tahun anggaran selanjutnya. Melalui sistem digitalisasi yang dimiliki Pemerintah Desa Namo Tualang dan Desa Gunung Kelawas tentunya diharapkan dapat mendukung tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih baik dan mempermudah dalam pemberian layanan yang dibutuhkan masyarakat.

C. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Administrasi Digital.

Penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan merupakan kebutuhan strategis, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi sistem pelayanan publik. Pemerintahan Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas menunjukkan sikap adaptif dengan membuka ruang kolaborasi bersama berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki sumber daya pengetahuan dan keahlian. Melalui komunikasi dan kerja sama dengan civitas akademika, kedua desa tersebut berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa agar lebih tertata, transparan, dan efisien.

Proses pengembangan kapasitas aparatur dimulai dari pelatihan penataan administrasi pemerintahan desa. Tahap awal dilakukan melalui pengelompokan manual buku-buku administrasi yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan digitalisasi data ke dalam sistem informasi berbasis teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa tidak hanya memahami tata kelola secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam sistem administrasi digital. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Pelatihan tersebut mengacu pada tiga dimensi kompetensi aparatur, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti yang disajikan pada tabel 3. Pada aspek kognitif, perangkat desa menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya administrasi pemerintahan, tata cara pengisian dokumen administrasi, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini diperkuat dengan kemampuan mereka mengoperasikan aplikasi digital sebagai bagian dari implementasi e-government.

Sedangkan pada aspek afektif terlihat dari sikap penerimaan/menyetujui, mengapresiasi, dan keyakinan perangkat desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas terhadap

manfaat sistem administrasi berbasis digital. Para peserta pelatihan menilai bahwa penerapan sistem digital tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pada aspek psikomotorik, perangkat desa telah mampu bekerja secara terarah sesuai prosedur, serta menunjukkan adaptasi dalam penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Bahkan, muncul inisiatif untuk mengintegrasikan pengembangan instrumen administrasi digital ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes) sebagai bentuk keberlanjutan program.

Tabel 3. Komponen acuan untuk mengetahui kapasitas aparatur pemerintahan desa berdasarkan pengklarifikasian kedalam teknologi informasi

Komponen	Indikator	Persentase Pemahaman
Kognitif	Menyadari pentingnya buku administrasi pemerintahan desa serta memahami prosedur pengisian dan pengelolaannya ke dalam sistem digital.	65%
	Mampu menerapkan praktik administrasi berbasis digital serta tata kelola pemerintahan desa secara tepat.	65%
	Pemanfaatan aplikasi digital pendukung administrasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi (e-government).	60%
Afektif	Menunjukkan sikap menerima, mendukung, dan memberi apresiasi terhadap materi pelatihan serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran.	65%
	Memiliki keyakinan bahwa penerapan administrasi berbasis aplikasi digital desa dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.	65%
Psikomotorik	Memiliki keterampilan dalam menjalankan serta menyesuaikan penggunaan aplikasi administrasi digital dalam sistem kerja pemerintahan desa.	60%
Rata-rata		63%

Pada Tabel 3 menggambarkan bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur dan masyarakat terkait penerapan administrasi desa berbasis digital berada pada angka 63%, yang dikategorikan cukup. Persentase ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta telah menyadari pentingnya sistem administrasi digital sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa. Kesadaran tersebut mencerminkan adanya penerimaan terhadap kebutuhan modernisasi administrasi yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Namun, masih terdapat 37% peserta yang belum menunjukkan perubahan perilaku yang optimal sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan, evaluasi, serta penguatan kapasitas secara bertahap.

Begitu juga meskipun digitalisasi dianggap penting, proses adaptasi teknologi tidak berjalan sepenuhnya mulus. Ketika materi pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi untuk mendukung administrasi desa disampaikan, peserta masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan konsep ke dalam praktik konkret, khususnya dalam pembuatan dan penyebaran informasi terkait tata kelola administrasi dan program pembangunan desa. Padahal, perkembangan teknologi dan tingginya akses internet di masyarakat desa seharusnya dapat menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan informasi pembangunan desa. Karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam pelatihan sangat relevan. Selain membantu memberikan pendampingan langsung, mereka juga memiliki pengalaman dalam mendokumentasikan data menggunakan excel dan merancang sistem pengelolaan administrasi digital serta produksi konten informasi yang dapat dimuat pada papan informasi desa.

Berdasarkan hasil evaluasi dari pendekatan pengabdian yang dilakukan, terdapat kebutuhan mendesak untuk menerapkan pelayanan berbasis teknologi, terutama terkait ketersediaan sistem basis data desa yang terintegrasi. Modernisasi administrasi dinilai mampu mempermudah proses layanan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta meningkatkan akurasi data terutama dalam mendukung perencanaan tata ruang, pengelolaan wilayah, serta mempermudah identifikasi dan pemetaan potensi wilayah [24][25]. Para kepala desa di Namo Tualang dan Gunung Kelawas menyatakan bahwa kehadiran tim pengabdian dari perguruan tinggi memberikan wawasan baru yang bermanfaat dalam pengelolaan administrasi. Pelatihan ini dipandang sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas layanan publik desa dan diharapkan dapat berlanjut secara berkesinambungan agar hasilnya benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi tata kelola pemerintahan desa.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes) serta tata kelola administrasi desa. Berdasarkan indikator perubahan perilaku, capaian peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan mencapai sekitar 70%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Sementara itu, kompetensi aparatur dalam penggunaan sistem administrasi berbasis digital berada pada

angka 63%, dikategorikan cukup, yang mengindikasikan bahwa pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi digital perlu terus ditingkatkan secara bertahap. Meskipun demikian, respons dan antusiasme yang ditunjukkan oleh aparatur pemerintahan desa dan masyarakat di Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas tergolong sangat tinggi, terutama selama proses pelatihan berlangsung.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pengabdian berjalan sesuai rencana dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu pelaksanaan sekitar dua bulan, sudah mulai terlihat perubahan positif dalam tata kelola administrasi desa. Perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran dari ketergantungan pada pihak kecamatan atau konsultan dalam penyusunan laporan administrasi, menuju kemampuan perangkat desa untuk melakukan penyusunan secara lebih mandiri. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi praktis yang dapat berkelanjutan apabila terus difasilitasi.

Program ini tidak hanya menghasilkan manfaat teknis, tetapi juga memperkuat budaya kerja kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan tim pengabdian. Lebih jauh, hasil pelatihan berpotensi menjadi model pengembangan kapasitas yang dapat direplikasi di desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya pelatihan lanjutan dan pendampingan secara berkala agar perubahan yang telah terbentuk dapat dipertahankan. Selain itu, perangkat desa diharapkan terus mensosialisasikan hasil pelatihan kepada masyarakat dan memasukkan penguatan administrasi digital ke dalam agenda prioritas pembangunan desa ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintahan Desa Namo Tualang dan Gunung Kelawas Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang serta seluruh perangkat desa, yang telah bersedia mendukung dan bekerjasama selama pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. H. Latif and I. Soleman, "Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga," *Musamus J. Public Adm.*, vol. 6, no. 2, pp. 670–680, 2024.

[2] N. L. L. Aziz, "Otonomi desa dan efektivitas dana desa," *J. Polit. Res.*, vol. 13, no. 2, pp. 193–211, 2016.

[3] D. S. Lindawaty, "Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]," *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri Dan Hub. Int.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–21, 2023.

[4] A. Tohawi, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia," *Islam. Law J. Siyashah*, vol. 10, no. 1, pp. 92–120, 2025.

[5] O. R. Danar, A. A. Novita, Y. Prakasa, and F. Rachman, "Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa," *J. Ilm. Adm. Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 200–209, 2021.

[6] A. Rizal, S. Triandani, M. April, and M. Alkadafi, "Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (e-government)," *J. El-Riyasah*, vol. 13, no. 1, pp. 76–91, 2022.

[7] N. Nuraisyah and D. Haryono, "Capacity building kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes)," *JPPi (Jurnal Penelit. Pendidik. Indones.)*, vol. 9, no. 1, pp. 513–522, 2023.

[8] B. Bikorin, I. Wahyudi, and A. Sulistyowati, "Capacity building as an effort to achieve organizational sustainability in Kalurahan Imogiri," *J. Abmas*, vol. 25, no. 1, pp. 51–62, 2025.

[9] A. A. H. E. Sayoga and N. Kharisma, "Pengembangan kapasitas dalam mendukung pemerintahan daerah yang inklusif," *J. Litbang Media Inf. Penelitian, Pengemb. dan IPTEK*, vol. 20, no. 2, pp. 125–134, 2024.

[10] A. Asrori, "Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus," *J. Bina Praja*, vol. 6, no. 2, pp. 101–116, 2014.

[11] A. Setiawan, P. Tjptoherijanto, B. R. Mahi, and K. Khoirunurrofik, "The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia," *Economies*, vol. 10, no. 12, p. 323, 2022.

[12] T. Darmi and I. M. Mujtahid, "Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019," *J. Gov. Public Policy*, vol. 8, no. 3, pp. 195–205, 2021.

[13] A. Rahmadanita and B. C. J. Wue, "Increasing The Capacity Of Village Apparatus In Implementing Public Service Functions In Baciro Village, Gondokusuman Sub-District, Yogyakarta City," *J. MSDA (Manajemen Sumber Daya Apar.)*, vol. 12, no. 2, pp. 198–213, 2024.

[14] D. Junus, S. Napir, M. Nuna, N. I. Harun, and A. P. Marzaman, "Strengthening the Implementation of Capacity Activities on the Development of Village Government Apparatus Resources in Gorontalo Regency," *J. Indones. Sch. Soc. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 20–26, 2022.

[15] A. Y. Siahaan and P. D. K. Pardede, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Cv Pena Persada, 2022.

[16] H. Nurcholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga, 2011.

[17] M. Nasir, "Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa," *PAMARENDA Public Adm. Gov. J.*, vol. 4, no. 3, pp. 468–478, 2025.

[18] R. Chambers, "Participatory Rural Appraisal: Principles and practice," *Dev. Pract.*, vol. 29, no. 4, pp. 456–465, 2019, doi: 10.1080/09614524.2019.1594184.

[19] T. A. K. Al-Qdah and M. Lacroix, "Syrian refugees in Jordan: Social workers use a Participatory Rapid Appraisal (PRA) methodology for needs assessment, human rights and community development," *Int. Soc. Work.*, vol. 60, no. 3, pp. 614–627, 2017.

[20] B. R. Simbolon, D. T. M. R. Panjaitan, and P. D. K. Pardede, "Government Communication Model in Strengthening Village Institutions in Bertah Village, North Sumatra," *J. Komun. Ikat. Sarj. Komun. Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 377–390, 2022.

[21] C. Sabatini, "HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMILIHAN UMUM (THE HARMONIZATION OF DEVELOPMENT PLANNING BASED ON THE LEGISLATION OF DEVELOPMENT PLANNING AND GENERAL ELECTION)," *Vol. 12, Nomor 1, Juli 2024*, p. 49, 2024.

[22] S. Helmi et al., *Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Percepatan Pelayanan dan Pembangunan Melalui Sistem Informasi Gampong (Sigap)*. CV. Green Publisher Indonesia, 2024.

[23] P. D. K. Pardede, D. T. M. R. Panjaitan, and E. Perwirawati, "Local Leadership in Implementing Public Digital Transformation towards Deli Serdang Smart City," *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintah. Semesta)*, vol. 4, no. 2, pp. 86–98, 2023.

[24] B. A. Hartono et al., "Digitalisasi Peta Administrasi Padukuhan Jambu dengan Teknologi GIS," *J. Atma Inovasia*, vol. 5, no. 4, pp. 304–310, 2025.

[25] B. P. Pratama, "Potensi Desa Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo Era Digitalisasi," *J. Atma Inovasia*, vol. 3, no. 2, pp. 123–126, 2023.

PENULIS



Piki Darma Kristian Pardede, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor



Apriliani Lase, prodi Pariwisata, Universitas Imelda Medan



Doli Tua M R Panjaitan, prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darma Agung



Prietsaweny Riris T Simamora, prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darma Agung